Bolehkah Memberikan Hadiah dari Akad Wadiah? Tinjauan Fatwa DSN MUI No.86/Dsn-Mui/XII/2012 terhadap Pemberian Hadiah dalam Produk Wadiah di BMT Bina Insan Sejahterah

Ruslan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said

e-mail: cenkruslan20@gmail.com

Abstrak

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis koperasi di mana dana dihimpun dari masyarakat. Dalam operasionalnya, BMT mengikuti ketentuan *Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012*. BMT Bina Insan Sejahterah melalui produk wadiah memberikan hadiah kepada calon anggota sebagai daya tarik bagi masyarakat. hadiah tersebut diberikan di awal, akan tetapi apakah dana hadiah diambilkan dari dana BMT atau nasabah?. berdasarkan praktek tersebut bagaimana status hadiah yang diberikan?. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian normatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dimana produk tabungan wadiah menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian Hadiah di BMT Bina Insan Sejahterah diberikan di awal akad tanpa adanya persyaratan khusus. Menurut penulis, pemberian hadiah pada produk wadiah di BMT Bina Insan Sejahtera tersebut diperbolehkan karena hadiah tersebut bersumber dari dana yang di siapkan oleh pihak BMT Bina Insan Sejahterah.

Kata kunci: *BMT, Wadiah, Hadiah.*

Abstract

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) is one form of Sharia Financial Institution (LKS) based on cooperative principles where funds are collected from the community. In its operations, BMT is bound by a fatwa issued by the DSN MUI. In 2012, DSN MUI No.86/Dsn-Mui/Xii/2012 established the mechanism of mudharabah. Interestingly, BMT Mitra Bina Insan Sejahterah offers a wadiah financing product that provides a gift for prospective members. What is the status of the gift in this contract? This study utilizes normative research, and the approach used is analytical, with wadiah savings products as the research object. The article finds that the gift in BMT Bina Insan Sejahterah is given at the beginning of the contract without any specific conditions. According to the author, giving a gift in this wadiah product at BMT is permissible because the gift comes from funds provided by BMT Bina Insan Sejahterah.

Keywords: *BMT, Wadiah, Reward.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber Hukum Islam. Bank syariah bukan hanya cara untuk mengislamkan perbankan namun juga praktik serta operasionalnya juga harus sesuai dengan tuntunan agama Islam dan tentunya sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya. Oleh karena itu, sangat menarik untuk ditelaah mengenai produk perbankan syariah utamanya produk penghimpunan dana dimana

implikasinya terhadap perkembangan bank syariah dan sebagai bentuk bakti kita pada Allah SWT dan sesuai tuntunan agama Islam (Yuanita, 2005:14).

Dalam perbankan syariah terdapat suatu kesepakatan dalam berbagai produk yang ditawarkan, kesepakatan itu biasa disebut akad. Dalam akad atau biasa disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih dan bisa dilakukan pengikatan antara satu lembaga dengan satu lembaga lain atau lebih ataupun orang dengan Lembaga. Namun tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk lembaga saja tetapi untuk masyarakat luas khususnya masyarakat ekonomi rendah. Oleh karena itu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didirikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut .

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Istilah baitul maal lebih mengacu pada usaha penghimpunan dan penyaluran dana non profit. Sedangkan baitul tamwil adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersial. (Setiawan, 2017). Oleh karena itu adanya BMT memiliki dua peran utama yaitu sebagai lembaga penyaluran dan pengelolaan harta ibadah seperti sedekah, zakat, infak dan wakaf dan juga berperan sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi seperti layaknya bank pada umumnya. Dalam fungsi yang kedua ini BMT dapat berperan sebagai lembaga keuangan maupun sebagai lembaga ekonomi. Peran BMT sebagai lembaga keuangan bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan peran BMT sebagai lembaga ekonomi, maka BMT berhak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pengelolaan perdagangan, industri dan juga pertanian. (Soemitra, 2017).

BMT Bina Insan Sejahtera merupakan salah satu BMT Bina Insan Sejahtera yang ada di Jawa timur, merupakan anak cabang dari BMT Bina Insan Sejahtera Pusat yang ada di Sumenep, Madura, yang digagas oleh Masyudi, selaku ketua Lembaga Perekonomian pada saat itu untuk mendirikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. BMT Bina Insan Sejahtera memiliki beberapa jenis simpanan tabungan. Variabilitas produk dan akad ini dilakukan untuk menarik minat nasabah untuk melakukan kegiatan tabungan di lembaga keuangan tersebut. Jenis produk yang disajikan adalah mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Tabungan Haji, Simpanan Pendidikan Simpanan Qurban Wadiah, dan lain sebagainya.

Ada yang menarik untuk dibahas dalam salah satu produk wadiah dalam BMT Bina Insan Sejahtera, yakni simpanan/ tabungan berjangka wadiah berhadiah langsung. Simpanan berjangka wadiah berhadiah adalah simpanan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan akad yad al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karakteristik wadiah yad dhamanah adalah apabila ada seseorang menitipkan hartanya maka penerima titipan dapat mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut dengan ijin dari pemilik dan memberi jaminan untuk mengembalikan harta itu secara utuh kapan pun pemilik barang menginginkannya. Sedangkan hasil dari pemanfaatan barang titipan tersebut tidak wajib dibagi hasil dengan pemberi titipan tetapi penerima titipan boleh memberikan bonus kepada si pemberi titipan namun tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. (Thian, 2021). Simpanan seperti itu juga diperkuat ketentuan hukumnya oleh fatwa DSN MUI dalam nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang jangka waktu penarikan simpanan yang bisa dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalam hal hak nasabah penyimpan atas bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, dan tidak unsur imbalan yang dipersyaratkan kecuali yang bersifat sukarela dari pihak bank/lembaga keuangan. Namun, pemberian insentif dalam bentuk bonus diperbolehkan asalkan pemberian bonus itu tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal atau persentase. Dalam BMT Bina Insan Sejahtera, terkait dengan simpanan berjangka wadiah berhadiah dalam pemberian bonus atau hadiah sudah diperjanjikan sejak awal akad

dilakukan dengan beberapa syarat tertentu seperti jangka waktu dan jumlah minimum deposito. Hal ini terlihat bertentangan dengan aturan atau syarat pemberian bonus dalam akad wadiah yad dhamanah. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana prosedur pemberian hadiah dalam produk simpanan berhadiah di BMT Bina Insan Sejahtera yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam berkenaan dengan praktik tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis masalah dengan cara mengumpulkan data-data untuk kepentingan analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan peraturan undang-undang dan teori-teori hukum yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Analitik (Analytical Approach) yaitu melakukan pengkajian secara konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. (Ibrahim, 2016). Objek penelitian yang hendak dianalisis adalah produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah di BMT Bina Insan Sejahtera dimana pada produk tersebut, ada pemberian hadiah yang diperjanjikan saat awal akad. Untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan maka diperlukan data-data konkrit untuk dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menghimpun data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, data-data tersebut akan diolah dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan konklusi (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadiah

Dapat diketahui bahwa wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bahasa Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

2. Rukun Wadi'ah

Rukun wadi'ah ada tiga:

- 1) ada pelaku akad
- 2) barang titipan
- 3) pernyataan kehendak (sighat ijab dan qabul) baik dilakukan secara lafadz atau hanya Tindakan

3. Syarat Wadi'ah

Jumhur ulama mensyaratkan dalam wadi'ah agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad wadi'ah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut Jumhur akad wadi'ahnya tidak dianggap sah.

Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan Syariah adalah untuk produk tabungan wadiah dan giro wadiah.

4. Giro Wadiah Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Giro wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank
5. Tabungan Wadiah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) senagai berikut:
 - 1) Bersifat simpanan
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
 - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.(Meriyati 2016:23)

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam hal rukun akad mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad mudharabah. Dari beberapa pendapat diatas maka rukun dari akad mudharabah terdiri atas:

- 1) Shahibul maal(pemilik dana/nasabah)
- 2) Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank),
- 3) Amal (usaha/pekerjaan),
- 4) Ijab Qabul.

3. Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- 1) Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- 2) Mengenai modal yang dititipkan
- 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

4. Prinsip mudharabah dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah atau Tabungan Mudharabah Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
- 2) Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - 5) Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 - 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan
5. Deposito Mudharabah
- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka. Deposito berjangka otomatis Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Deposito Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:
- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
 - b) Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - e) Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
 - f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan atau ganjaran karena memenangi suatu perlombaan dan atau tanda kenang-kenangan tanda perpisahan, cedera mata. Hadiah dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

2. Rukun Dan syarat hadiah

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. (Menurut Rusyd, 2015:12) rukun hadiah ada tiga:

- 1) pemberi hadiah (al-wahib)
- 2) penerima hadiah (al-mauhub lahu)
- 3) perbuatan hadiah.

3. Rukun hadiah ada tiga macam:

- 1) Aqidain (orang yang memberikan dan orang yang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah
- 2) mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta
- 3) shighat atau ijab dan qabul.

D. Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Wadiah di BMT Bina Insan Sejahterah

Wadiah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan wadiah dan mudharabah merupakan akad tabarru' yakni akad tolong menolong yang tidak mengharapkan keuntungan. Akad wadiah sah jika mengikuti aturan, rukun, dan syarat wadiah dalam hukum Islam. Akad wadiah banyak dipakai dalam lembaga keuangan syariah termasuk BMT Bina Insan Sejahterah yang menjadikan akad wadiah sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad wadiah yang digunakan oleh BMT Bina Insan Sejahterah tersebut.

Dalam peraturan BI No.7/46/PBI/2005 bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bagian pertama penghimpun dana pasal 3, bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro atau tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah berlaku persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut: Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; dana titipan dapat diambil setiap saat; tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Ada satu hal yang menarik dalam akad wadiah yang dilakukan oleh Bina Insan Sejahterah yakni dalam produk simpanan berjangka wadiah dan mudharabah berhadiah. Dalam produk simpanan ini, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang berlaku. Praktik seperti ini menimbulkan suatu permasalahan karena ada pemberian hadiah secara langsung pada awal akad.

Ada prosedur yang harus diperhatikan sebelum menjadi bagian dari nasabah produk simpanan berjangka wadiah dan mudharabah berhadiah. Prosedur tersebut berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan wadiah berhadiah yaitu dengan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan pihak BMT Bina Insan Sejahterah dengan menyertakan fotocopy KTP, fotocopy KK, dan uang pendaftaran sebesar Tujuh ribu rupiah sebagai biaya administrasi. Setelah itu, nasabah membayarkan sejumlah uang deposit minimal sebesar lima juta rupiah atau sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad wadiah berhadiah.. Sebagaimana namanya, produk ini merupakan tabungan berjangka yakni jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah setoran tetap.

Dalam sistem tabungan berjangka ini, uang yang ditabung oleh nasabah baru bisa diambil pada saat akhir periode atau masa jatuh tempo simpanan. Dengan demikian nasabah tidak bisa menarik uang tabungan sewaktu-waktu karena pada saat awal mendaftar sebagai nasabah produk wadiah berhadiah, nasabah sudah menyepakati jangka waktu tabungan yakni minimal 10 bulan atau 1 tahun maupun 2 tahun. Saat awal akad ini, nasabah bisa langsung memilih hadiah berupa barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan syarat yang telah dijelaskan oleh pihak BMT Bina Insan Sejahterah sebelumnya yakni harus menyepakati besaran minimal jumlah uang deposit awal dan jangka waktu simpanan. Hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah berupa barang elektronik tertentu dengan nominal harga yang disesuaikan dari besaran deposit sebagai setoran awal dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tadi. Dengan begitu, pihak BMT Bina Insan Sejahterah dapat melakukan penghitungan nominal hadiah berdasarkan perhitungan rupiah.

Setelah melakukan penghitungan, pihak BMT Bina Insan Sejahterah baru menawarkan hadiah yang akan diambil nasabah. Hadiah yang ditawarkan pihak BMT bermacam-macam seperti kipas angin, rice cooker, hingga sepeda motor. Setelah dipilih oleh nasabah, barulah pihak BMT membelikan barang yang diinginkan nasabah. Biasanya hadiah dapat diambil minimal tiga hari setelah akad tersebut dan maksimal 7 hari dari hari melakukan perjanjian. Pihak BMT Bina Insan Sejahterah juga akan menjelaskan kepada nasabah sebelum membuka tabungan berjangka wadiah Mudharabah berhadiah bahwa simpanan ini merupakan produk tabungan yang akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi berdasarkan syarat ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Pada fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa wadiah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada bonus yang dijanjikan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya secara sukarela. Berdasarkan fatwa tersebut menjadi jelas bahwa boleh memberikan imbalan/bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian tersebut bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa dana titipan wadiah bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga apa yang terjadi di BMT Bina Insan Sejahtera yang mensyaratkan jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka hal tersebut tidak melanggar syariat.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII/2012 Tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana LKS bahwa LKS berhak memberikan syarat kepada penerima hadiah selama syarat tersebut tidak menjerus kepada riba. Apabila si penerima hadiah tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh LKS, maka ia harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Berdasarkan fatwa tersebut, maka pihak BMT Bina Insan Sejahtera boleh memberikan syarat dalam pemberian hadiah tersebut dan sebagaimana yang telah dipaparkan, syarat yang diberikan tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak ada unsur riba di dalamnya karena masih berada di jalur ketentuan fatwa DSN-MUI.

Pada dasarnya, pemberian hadiah di BMT Bina Insan Sejahtera merupakan pemberian suka rela yang bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung. Pemberian ini juga bisa menjadi sarana BMT Bina Insan Sejahtera agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun. Apabila nantinya pihak BMT Bina Insan Sejahtera mengalami kerugian, maka pihak BMT Bina Insan Sejahtera tidak akan menarik kembali hadiah tersebut karena hadiah yang diberikan merupakan hadiah sukarela sehingga nasabah tidak dirugikan dalam hal ini. Selain itu, dengan adanya produk simpanan berjangka wadiah dan Mudharabah berhadiah ini manfaatnya banyak dirasakan oleh nasabah karena dengan membuka tabungan wadiah mudharabah berhadiah, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dan tidak dipungut biaya apapun. Tabungan nasabah juga tidak berkurang sepeserpun. Hal ini terlihat dalam unggahan blog BMT Bina Insan Sejahtera yang mendokumentasikan pemberian hadiah kepada para nasabah.

SIMPULAN

Dalam produk Simpanan Berjangka Wadiah Mudharabah Berhadiah di BMT Bina Insan Sejahtera, ada ketentuan khusus bahwa nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan syarat nasabah harus menyepakati setoran minimal deposit awal serta jangka waktu tertentu. Dalam akad wadiah Mudharabah, hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal akad kecuali jika hadiah tersebut diberikan secara sukarela. Sedangkan pada praktiknya, nasabah akan mendapat hadiah langsung pada produk wadiah mudharabah berhadiah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, hadiah boleh diberikan oleh pihak BMT Bina Insan Sejahtera dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad; hadiah berupa barang bukan uang dan pihak BMT Bina Insan Sejahtera boleh memberikan syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari praktik pemberian hadiah pada produk wadiah mudharabah berhadiah di BMT Bina Insan Sejahtera dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah tersebut tidak melanggar aturan syariat. Selain itu produk ini bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan menjadi sarana BMT Bina Insan Sejahtera agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006).

- Agustianto Mingka. Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Aidil Alfin, "Multi-Akad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah", *Al- Hurriyah*, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2015).
- Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013).
- Am. M. Hafidz Ms., "Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2015).
- Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*, 2015.
- Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan Griya BSM. <https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/>
- Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 (Juli, 2015).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.